



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK WONOGIRI (Perseroda)  
KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor : KP-01/151/I/Lap.OJK/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Bandel  
Perihal : **Laporan Profil Risiko  
Semester II Tahun 2022 dan  
Laporan Tata Kelola Tahun 2022**

Wonogiri, 25 Januari 2023

**Kepada :**  
**Yth. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo**  
**Jalan Slamet Riyadi No 382 Sriwedari Laweyan 57141**  
**Di**

**SURAKARTA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 /SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/Seojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 18 Juli 2022 Pasal 8 dan pasal 12

bersama ini kami kirimkan :

1. Laporan Profil Risiko Semester 2 Tahun 2022
2. Laporan Tata Kelola Tahun 2022

sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan untuk menjadi periksa.

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK WONOGIRI (Perseroda)**

**YANI HARMINI, SP**  
Direktur Umum & Kepatuhan

**Tembusan dikirimkan kepada Yth :**

1. Ketua Perbamide Jawa Tengah (Laporan GCG 2022)
2. Ketua Perbarindo Solo Raya (Laporan GCG 2022)
3. Majalah Media BPR (Laporan GCG 2022)
4. Ketua Dewan Komisaris PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
5. Arsip

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

---

Pelapor

**PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda)**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Reliansi

505358-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601576-  
24012023164218

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

kasubidpatuh@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-24 16:42:18



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



Buk: Pengiriman Kantor Kirim: KC WONOGIRI 51600 Tanggal Posting: 01-Feb-2023 Wkt Posting: 08:51:22 0x2x0 cm (0)	Pengirim <b>PT BANK BKK          WONOGIRI</b> J. JEN. SUKIRMAN WONOGIRI	
ID Pelanggan:	Penerima <b>KETUA UMUM          PERBARINDO PUSAT</b> KOTA JAKARTA PUSAT, CEHRAMA PUTIH, CEHRAMA PUTIH TENJUR	Berat: 0.2 KG Bas kirim: Rp. 28.000 Nett: Rp. 28.000 Tarif sudah termasuk PPN
 <b>P2302070014211</b> <small>LINK QR CODE          https://www.posindonesia.com</small>	Penyelesaian pengiriman 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman: KPI 01/15/1/LAP/01/2023 3. Nilai pertanggungjawaban kiriman: Rp. 0 4. Asuransi: Rp. 0	
Area kantor: POS Sukses Ravel Estimasi Arisan: 0671x-2023		

Pengiriman Kirim: KC WONOGIRI 51600 Posting: 01-Feb-2023 Wkt Posting: 08:50:55 0x0	Pengirim <b>PT BANK BKK          WONOGIRI</b> J. JEN. SUKIRMAN WONOGIRI	
inggan:	Penerima <b>MAJALAH MEDIA BPR</b> KOTA JAKARTA PUSAT, CEHRAMA PUTIH, CEHRAMA PUTIH TENJUR	Berat: 0.2 KG Bas kirim: Rp. 28.000 Nett: Rp. 28.000 Tarif sudah termasuk PPN
 <b>P2302070014213</b> <small>LINK QR CODE          https://www.posindonesia.com</small>	Penyelesaian pengiriman 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman: KPI 01/15/1/LAP/01/2023 3. Nilai pertanggungjawaban kiriman: Rp. 0 4. Asuransi: Rp. 0	
01.501.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BKK WONOGIRI (PERSERODA)  
TAHUN 2022**



**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah  
TELEPON: 0273 322214 - 0273 322747**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola, dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparancy) sebagai mana dimaksud dalam pasal 76 Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola BPR. Laporan transparansi penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) disusun untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, penerapan tata kelola yang baik di PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menerapkan prinsip-prinsip TARIF sebagaimana telah kami ungkapkan pada laporan tahun-tahun sebelumnya. Penjabaran dari penerapan tata kelola perusahaan sebagaimana tersaji dalam Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola tahun 2022.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	SARTI, SE.MM
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p><b>TUGAS :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>2. Menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (bisnis plan dan corporate plan).</li><li>3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi.</li><li>4. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja pada perusahaan.</li></ol> <p><b>TANGGUNG JAWAB</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan.</li><li>2. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan.</li><li>3. Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>4. Mewakili Perusahaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan.</li><li>5. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>6. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan.</li><li>7. Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan.</li><li>8. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.</li><li>9. Wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>10. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li></ol>		
2.	Nama	:	SUWARTO, SE
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p><b>TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk perbankan, baik dana dan kredit serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan.</li><li>2. Menerapkan Tata Kelola pada pelaksanaan operasional bidang pemasaran di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>3. Menyusun rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di bidang Pemasaran.</li><li>4. Mengkoordinir dan mengorganisir bidang pemasaran dan kantor operasional dalam kegiatan operasional perusahaan.</li><li>5. Melakukan riset dan pengembangan produk.</li><li>6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan</li></ol>		



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kepada OJK, kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

**TANGGUNG JAWAB**

1. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran produk dan jasa Perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan dalam administrasi kredit dan dana serta pengendalian terhadap bidang pemasaran.
3. Menetapkan produk dan layanan serta melakukan inovasi, baik dalam organisasi maupun operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Merekomendasikan/ mengusulkan penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.
5. Melakukan pelaksanaan pengawasan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana Perusahaan.
6. Menetapkan suku bunga yaitu suku bunga Pinjaman, Antar Kantor, Simpanan, Antar Bank Pasiva dan tarif jasa lainnya.
7. Memonitor perkembangan suku bunga, kegiatan pemasaran produk dan jasa perusahaan serta mengusulkan kebijakan bidang pemasaran.
8. Melakukan inovasi dan perbaikan pemasaran kredit, dana dan produk layanan lainnya serta teknologi pemasarannya.

3.	Nama	:	YANI HARMINI, SP
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p><b>TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan.</li><li>2. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>3. Menyusun rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di bidang non Pemasaran.</li><li>4. Mengkoordinir dan mengorganisir bidang non pemasaran dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.</li><li>5. Mengelola Sumber Daya Manusia dan Aset Tetap Inventaris perusahaan.</li><li>6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li><li>7. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lainnya serta Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Perusahaan yang berlaku.</li></ol> <p><b>TANGGUNG JAWAB</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk satuan/unit kerja, tim dan/atau komite sesuai kebutuhan perusahaan.</li><li>2. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan.</li><li>3. Menetapkan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>4. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau menghapus melepaskan hak aktiva tetap dan inventaris berdasarkan ketentuan.</li><li>5. Membentuk Satuan/Unit Kerja, Badan Pertimbangan, Tim dan/atau Komite sesuai kebutuhan Perusahaan.</li><li>6. Menetapkan kebijakan dan mengendalikan bidang umum, SDM, TI, serta bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk APU dan PPT.</li><li>7. Menetapkan kebijakan umum, kepegawaian dan kedisiplinan pegawai, penghasilan pengurus dan pegawai, pensiun dan lain-lain bersama Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>8. Memonitor dan memastikan target perusahaan tercapai dengan efisien.</li><li>9. Menyusun Rencana Bisnis secara realistis.</li></ol>			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
1. Peningkatan kualitas SDM dibidang perkreditan dengan mengikutkan diklat kompetensi pemutus			





1. kredit, analisa, appraisal agunan dan penagihan.
2. Pemutusan Kredit berbasis Risiko.
3. Membuat SOP monitoring pengawasan LAR.
4. Pengembangan soft ware, hard ware, jaringan dan aplikasi untuk koreksi data, absensi dan data kepegawaian serta pembagian tugas personil TI.
5. Menindaklanjuti hasil temuan dari OJK dan KAP.
6. Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap.
7. Perubahan kebijakan pemberian Reward dan Punishment.
8. Menyelaraskan pemahaman fungsi Bidang Manajemen Risiko terhadap bidang lain agar terjadi harmonisasi.
9. Evaluasi Pengadaan dan Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris.
10. Pelaksanaan audit TI berbasis stress test .
11. Membuat action plan setiap bulan. bagi Cabang dengan deviasi tinggi dalam pencapaian RBB.
12. Pengisian dan mutasi Pejabat.
13. Pelimpahan pengikatan Agunan khususnya Notaris yang meninggal kepada Notaris lain.
14. Setiap Kantor Operasional setiap bulan membuat action plan penurunan LAR.
15. Pemantauan pengikatan agunan yang lebih dari 6 bulan yang belum selesai.
16. Assesmen kredit relaksasi dilengkapi dengan data dan fakta yang terekam jelas sebagai gambaran kondisi terkini.
17. Mengoptimalkan sistem rapat komite kredit di Bidang Pemasaran untuk berkas kredit dengan Opini Tinggi dan Sangat Tinggi Plafon diatas 300.000.000.
18. Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko lebih optimal dalam memitigasi risiko bank, dalam mengukur risk appetite dan risk tolerance lebih tepat.
19. Komite kredit dalam keputusan pemberian kredit wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi data untuk dijadikan materi dalam rapat komite kredit.
20. Menindaklanjuti kegiatan operasional dengan penerapan TKS sesuai dengan POJK 03/POJK.03/2022.
21. Meningkatkan penghimpunan dana dengan produk tabungan baru TAMADES MAPAN yang merupakan jenis tabungan berjangka.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan secara umum sebagian besar rekomendasi dari Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris. 2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham. 3. Memimpin rapat Dewan Komisaris. 4. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.  TUGAS LAIN SEBAGAI PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. Mendorong diterapkannya prinsip tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate		



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

Governance) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan

2. Melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
3. Memastikan perusahaan memiliki dan menjalankan strategi bisnis yang efektif, mencakup di dalamnya pemantauan anggaran, pembagian tugas dan efektifitas strategi tersebut.
4. Memastikan jajaran eksekutif yang diangkat oleh perusahaan adalah orang-orang profesional yang memenuhi kualifikasi.
5. Memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik, sehingga setiap potensi risiko telah teridentifikasi berikut dengan langkah penyelesaian.
6. Memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun peraturan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
7. Memastikan perusahaan memiliki sistem audit dan sistem pengendalian yang baik sehingga potensi risiko teridentifikasi dan dikelola dengan baik.
8. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
9. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan stakeholder yang lain.
10. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
11. Menjamin akuntabilitas organ perusahaan.
12. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

3.	Nama	:	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		

1. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas.

2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris Utama.

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Agar dilakukan peningkatan kualitas SDM dibidang perkreditan untuk diikuti diklat peningkatan kualitas/ kompetensi analis pejabat pemutus kredit, analisa kredit, appraisal agunan, peningkatan kualitas/independen/integritas dan kapasitas remedial.
2. Pemutusan Kredit berbasis Risiko.
3. Membuat SOP monitoring pengawasan LAR.
4. Pengembangan soft ware, hard ware dan aplikasi untuk koreksi data, absensi dan data kepegawaian.
5. Pembagian tugas personil IT.
6. Tindaklanjuti temuan dari OJK dan KAP.
7. Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap.
8. Evaluasi kebijakan pemberian Reward dan Punishment.
9. Menyelaraskan pemahaman fungsi Manajemen risiko pada bidang yang lain.
10. Evaluasi Pengadaan dan Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris.
11. Pelaksanaan audit TI berbasis stress test.
12. Cabang dengan deviasi tinggi pencapaian RBB membuat action plan setiap bulan.
13. Kekosongan Pejabat agar segera diisi.
14. Pelimpahan perikatan Agunan khususnya Notaris yang meninggal dunia.
15. Semua kantor operasional membuat action plan penurunan LAR setiap bulan.
16. Pemantauan pengikatan agunan yang lebih dari 6 bulan yang belum selesai.
17. Assesmen kredit relaksasi dilengkapi dengan data dan fakta yang terekam jelas sebagai gambaran kondisi terkini.
18. Mengoptimalkan sistem rapat komite kredit di Bidang Pemasaran untuk berkas kredit dengan Opini Tinggi dan Sangat Tinggi Plafon diatas 300.000.000.
19. Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko lebih optimal dalam memitigasi risiko bank, dalam mengukur risk appetite dan risk tolerance lebih tepat.
20. Komite kredit dalam keputusan pemberian kredit wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi data untuk dijadikan materi dalam rapat komite kredit.
21. Menindaklanjuti kegiatan operasional dengan penerapan TKS sesuai dengan POJK 03/POJK.03/2022.
22. Meningkatkan penghipunan dana dengan produk tabungan baru Tamades Mapan yaitu jenis



tabungan berjangka.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Berdasarkan RUPS tanggal, 08 September 2022 telah disetujui pemberhentikan dengan hormat Komisaris atas nama EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos. M.Si terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya dilakukan seleksi pengisian Jabatan Komisaris. Berdasarkan RUPS-LB tanggal, 29 November 2022 telah dilakukan penetapan Calon Komisaris dan sudah diajukan surat permohonan persetujuan kepada OJK Nomor KP-01/2280/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022. Selanjutnya akan segera dilakukan pelaporan pengangkatan Komisaris kepada OJK setelah adanya pengumuman hasil Uji Kelayakan dan Keputusan pada kesempatan pertama.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan secara umum sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti Direksi. Rekomendasi Dewan Komisaris tertuang dalam Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi dengan rutinitas paling sedikit satu bulan sekali.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Karena modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) BPR belum membentuk komite-komite kerja	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SARTI, SE.MM	Rp0,00	0%
2.	SUWARTO, SE	Rp0,00	0%
3.	YANI HARMINI, SP	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SARTI, SE.MM	-	-	0%
2.	SUWARTO, SE	-	-	0%
3.	YANI HARMINI, SP	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain				



### C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SARTI, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUWARTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	YANI HARMINI, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham				

#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SARTI, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUWARTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	YANI HARMINI, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham				

### D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	Rp0,00	0%
2.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	Rp0,00	0%
3.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada BPR			



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	-	-	0%
2.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	-	-	0%
3.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain				

## E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham				



## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp288.070.400,00	3	Rp534.224.204,00
2.	Tunjangan	3	Rp1.083.586.323,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	3	Rp239.744.867,00	3	Rp143.846.921,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp426.761.604,00	3	Rp187.700.395,00
Total			Rp2.038.163.194,00		Rp865.771.520,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunasi Lainnya adalah Tunjangan Hari Raya, Gaji Ke 13 dan Gaji ke 14 yang diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan dan dianggarkan dalam RBB					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (3)	BPJS (1)
4.	Fasilitas Lainnya	TABLET (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
-			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.8 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.19 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji dihitung berdasarkan gaji beserta semua tunjangan yang diterima selama 1 tahun	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	19 Februari 2022	3	<p>MATERI PEMBAHASAN :</p> <p>TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT PENGURUS TANGGAL 24 DESEMBER 2021</p> <p>BIDANG KREDIT</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas SDM, akan mengikutkan pegawai pada diklat tentang perkreditan.</li><li>2. Pemutusan Kredit berbasis Risiko,</li><li>3. Peningkatan kualitas dokumen kredit</li><li>4. Peningkatan kualitas /kompetensi analis pejabat pemutus kredit, akan dilakukan pelatihan dan diskusi antar analis untuk meningkatkan kompetensi.</li><li>5. Peningkatan kualitas/independent/integritas dan kapasitas team remedial. akan mengikutkan pada diklat strategi penanganan kredit bermasalah.</li><li>6. Membuat SOP/ketentuan proses monitoring pengawasan kredit bermasalah,</li><li>7. Penurunan LAR (Loan at Risk) tahun 2022, Direksi akan berfokus pada penanganan kredit relaksasi dengan target selesai sebelum Maret 2023.</li></ol> <p>BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan soft ware dan hard ware aplikasi TI, Cut Off soft ware Pengadaan Server Pusat, Pengembangan aplikasi untuk koreksi data, absensi pegawai, data kepegawaian dan pembayaran PBB.</li><li>2. Pembagian tugas pada personil (Programer, Jaringan, Akunting, Hardware/Software dan Multimedia).</li></ol>





**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

**Telepon: 0273 322214 - 0273 322747**

**Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)**

			<p>3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) membuat program kerja pemeriksaan yang berbasis risiko.</p> <p>4. Direksi menindaklanjuti hasil temuan KAP/OJK paling lambat bulan Maret 2022.</p> <p>5. Atas temuan dari OJK/KAP di bidang kredit, Direksi akan mengevaluasi kebijakan pemutus kredit yang menjadi kewenangan Pimpinan Cabang dan dibuat strategi mengantisipasi peningkatan LAR.</p> <p>6. Untuk pencapaian RBB dengan deviasi yang besar, Direksi akan memerintahkan Kantor Cabang Jatipurno dan Kantor Cabang Batuwarno untuk membuat action plan pencapaian RBB dan melaporkan kepada Direksi secara berkala.</p>
2.	25 Maret 2022	6	<p>MATERI PEMBAHASAN : TEMUAN HASIL PEMERIKSAAAN OJK DAN TEMUAN KAP TAHUN 2022</p> <p>1. Hasil temuan dari OJK dan KAP telah disampaikan Direksi dalam Rapat Bersama dengan Dewan Komisaris dan segera ditindaklanjuti.</p> <p>2. Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap.</p> <p>3. Perubahan kebijakan Pemberian Reward dan Punishment dan SOP SDM.</p> <p>4. Menyelaraskan pemahaman fungsi Manajemen Risiko pada bidang yang lain sehingga terjadi harmonisasi.</p> <p>5. Evaluasi pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris, rencana penghapusan ATI yang sudah rusak/hilang dan telah memiliki nilai buku 1.</p> <p>6. Melaksanakan rencana kerja bidang umum dan bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko sesuai RBB.</p> <p>7. Pelaksanaan audit TI berbasis stress test untuk memastikan bahwa core banking system telah sesuai dengan Peraturan OJK, yang apabila tidak memungkinkan untuk dilaksanakan oleh auditor internal maka akan bekerjasama dengan auditor eksternal.</p> <p>8. Action Plan menurunkan LAR dari pencapaian bulan Maret 2022 sebesar 28,23% menjadi 16,81 % pada bulan Desember 2022.</p> <p>9. Memberikan surat kepada Cabang yang memiliki deviasi RBB tinggi untuk membuat action plan pencapaian RBB.</p> <p>10. Membuat laporan perkembangan LAR secara gabungan setiap bulan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>11. Sharing penajaman Analisa kredit segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan paling lambat bulan Mei 2022.</p> <p>12. Memerintahkan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk melakukan pemantauan terhadap kredit relaksasi dan melaporkan kepada Direksi potensi risiko yang mungkin timbul serta mitigasinya mulai bulan April 2022.</p> <p>13. Melakukan evaluasi kebijakan pemberian reward dan punishment dan ditetapkan paling lambat bulan April 2022.</p>
3.	09 April 2022	4	<p>MATERI PEMBAHASAN : MONITORING OPERASIONAL PERUSAHAAN,</p> <p>1. Segera merealisasi QRIS karena sudah ada beberapa</p>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			<p>merchan untuk target QRIS.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Agenda pengisian Jabatan yang kosong sekaligus mutasi beberapa pejabat pada tanggal 11 April 2022.</li><li>3. Melakukan pengawalan kredit relaksasi dengan target minimal 80 % selesai di bulan Desember 2022.</li><li>4. Melakukan pengawalan pengikatan agunan, dan tinggal 1 Notaris yang masih menyisakan pekerjaan dalam waktu melebihi kesepakatan.</li><li>5. Support untuk melakukan pengembangan mengikuti perkembangan untuk bidang TI.</li><li>6. Dilakukan perubahan pemberian reward dan punishment serta target kinerja untuk calon pegawai dengan harapan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.</li><li>7. Staf legal yang ada akan diikutkan Pendidikan profesi Advokat untuk dapat back up perusahaan apabila menghadapi kasus hukum.</li><li>8. Melakukan konsultasi dengan OJK tentang Penggunaan SLIK untuk rekrutmen pegawai, dan pembuatan film tentang aktivitas pelayanan perbankan, untuk diputar saat melakukan interview segera ditindaklanjuti.</li></ol>
4.	20 April 2022	4	<p>MATERI PEMBAHASAN : SUPERVISI KANTOR CABANG SLOGOHIMO DAN KANTOR CABANG PURWANTORO</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Segera dilakukan inventarisasi debitur yang belum ada pengikatan agunan dan diupayakan solusi untuk mengantisipasi kerugian pembentukan PPAP.</li><li>2. Membuat Action Plan LAR yang lebih efektif dan efisien sebagaimana program percepatan peningkatan Kualitas Kredit.</li><li>3. Analisa kapasitas debitur, diperkuat dengan data pendukung untuk menyatakan obyektifitas dari analisis dalam memutus kredit.</li><li>4. Kolektibilitas DPK yang terus meningkat dilakukan pengawasan yang lebih ketat, tepat dan benar, dan dalam memutus kredit berpegang pada prinsip kehati-hatiannya, sehingga tidak menambah beban LAR/NPL yang sudah ada dan belum terselesaikan.</li></ol>
5.	18 Mei 2022	6	<p>MATERI PEMBAHASAN : TINDAK LANJUT SUPERVISI TANGGAL 20 APRIL 2022 DAN EVALUASI KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2022</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Damas tidak dapat tercapai dan mempengaruhi tidak tercapainya Asset, hal tersebut disebabkan menjelang lebaran dampak pandemic sudah menurun sehingga aktivitas masyarakat kembali normal maka mobilitas keuangan meningkat. Namun melihat perkembangan pertumbuhan Damas sampai pertengahan Mei 2022 optimis dapat mencapai target RBB.</li><li>2. Telah dilakukan pengawalan Program Percepatan Peningkatan Kualitas Kredit LAR dengan menetapkan kebijakan untuk menempatkan staf khusus yang menangani kredit bermasalah pada setiap cabang dan mengawal penyelesaian kredit relaksasi minimal dapat tercapai 80 % dari rencana penyelesaian semua kredit relaksasi pada bulan Desember 2022.</li><li>3. Melakukan evaluasi Ketentuan Analisa Kredit dengan</li></ol>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			<p>melakukan perubahan pada pengungkapan Omzet debitur/calon debitur secara lebih terperinci sesuai dengan kondisi usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Meningkatkan kualitas dokumen kredit.</li><li>5. Peningkatan kompetensi dan integritas pejabat pemutus kredit dengan mengikutkan Diklat.</li><li>6. Analisa kredit berbasis risiko sesuai dengan POJK No 3/POJK.03/2022 tentang TKS.</li><li>7. Pengikatan Agunan kredit Notaris yang meninggal, sudah ada beberapa alternatif penyelesaian antara lain, pihak keluarga akan menggandeng notaris lain untuk penyelesaian pengikatan agunan dan perusahaan akan menggandeng notaris lain untuk pelimpahan pengikatan agunan dengan biaya dari keluarga Notaris.</li></ol>
6.	03 Juni 2022	3	<p><b>MATERI PEMBAHASAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan kredit dengan plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak didukung dengan data dan dokumen 5 C.</li><li>2. Keputusan tersebut mengakibatkan Bank tidak mendapatkan kualitas kredit dan kualitas dokumen sesuai dengan visi dan misi Bank.</li><li>3. Bank tidak mampu menjaga kualitas SDM dengan baik.</li><li>4. Bank hanya mendapatkan peningkatan out standing kredit.</li><li>5. Pejabat pemutus kredit belum memahami POJK.</li><li>6. Proses operasional Bank tidak sejalan dengan program percepatan peningkatan kualitas aktiva produktif.</li><li>7. Realisasi Damas terhadap RBB yang masih kurang.</li><li>8. Rasio CAR turun.</li><li>9. Monitoring yang komprehensif terhadap peningkatan kredit berisiko tinggi (LAR)</li></ol> <p><b>REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direksi konsisten terhadap penerapan tata kelola kredit dan manajemen risiko serta pemahaman terhadap POJK tentang Tingkat Kesehatan Bank, terutama dalam meningkatkan kompetensi pejabat pemutus kredit.</li><li>2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang kredit terkait dengan analisa kredit yang berbasis risiko dan penilaian agunan/apraisal.</li><li>3. Menerapkan punishment (TGR) terhadap pejabat pemutus kredit yang tidak sesuai dengan SOP.</li><li>4. Prioritas penanganan pengikatan agunan Notaris yang belum selesai sesuai MoU.</li><li>5. Direksi melakukan inventarisasi terhadap semua dokumen kredit yang dalam keputusan tidak sesuai dengan SOP.</li><li>6. Direksi disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan terhadap kinerja bank, dengan inovasi dan strategi untuk meningkatkan capaian, melalui analisa SWOT baik bidang damas, kredit serta operasional lainnya.</li><li>7. Optimalkan kinerja kepala cabang, bidang pemasaran dan bidang terkait untuk mendorong pertumbuhan aset serta kualitas kredit.</li><li>8. Direksi disarankan meningkatkan sinergi dengan lembaga keuangan dan instansi lain untuk membuka jaringan baru.</li><li>9. Direksi diminta melakukan evaluasi terhadap strategi</li></ol>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			penanganan LAR dalam percepatan peningkatan kualitas kredit. 10. Optimalisasi kualitas komite kredit.
7.	30 Juni 2022	5	<p><b>MATERI PEMBAHASAN :</b> <b>SOSIALISASI/LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BERSAMA OJK DAN PEMANTAUAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Literasi dan Inklusi Keuangan adalah agenda tahunan yang pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada OJK, pelaksanaan kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk lebih mengenalkan produk kepada masyarakat.</li><li>2. Kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan kedepan lebih terencana dengan menetapkan sasaran untuk kalangan UMKM dengan target memberikan pemahaman tentang peran Lembaga keuangan dalam membantu mengelola keuangan mereka dalam bentuk layanan jasa perbankan.</li><li>3. Terus meningkatkan kemampuan marketing dalam memproyeksikan sasaran dan target dalam bentuk RBB yang lebih rasional dan optimis.</li><li>4. Mengawal penyelesaian kredit relaksasi dengan target 80% selesai bulan Desember 2022.</li><li>5. Mensupport kantor cabang melakukan assessment debitur relaksasi untuk mengelompokkan debitur yang mampu bertahan dan tidak mampu bertahan dilakukan penanganan berdasarkan assessment untuk dapat menekan LAR sesuai target setiap bulan.</li><li>6. Meningkatkan kemampuan staf pemasaran dalam melakukan Analisa kredit dan penilaian agunan dengan melakukan Diklat Analisa Kredit dan Appraisal.</li><li>7. Meningkatkan kemampuan SDM penanganan kredit bermasalah dengan mengikuti diklat, seminar, dan workshop, penambahan SDM dilakukan bersamaan dengan rekrutmen SDM baru.</li><li>8. Rakor setiap bulan dengan Kantor Cabang untuk mengevaluasi kinerja bulan sebelumnya dan merencanakan strategi untuk mencapai target bulan berikutnya. Komitmen Pinca atas pencapaian RBB setiap bulan termasuk penurunan LAR.</li><li>9. Melakukan stress test posisi LAR terhadap potensi pembentukan PPAP setiap bulan.</li></ol>
8.	16 Juli 2022	5	<p><b>MATERI PEMBAHASAN :</b> <b>PERKEMBANGAN LAR DAN PERIKATAN AGUNAN KREDIT</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk dua agenda diklat analisa Kredit dan Penilaian Agunan yang telah terlaksana, kepada Bidang pemasaran untuk melakukan uji coba hasil pelatihan selanjutnya secara seragam akan diterapkan dalam pembuatan Analisa kredit di semua kantor operasional.</li><li>2. Evaluasi kebijakan Analisa Kredit dengan menggunakan aplikasi Analisa Kredit hasil pelatihan dan berlaku juga untuk Appraisal agunan.</li><li>3. Semua Kantor Operasional membuat action plan penurunan LAR sebagaimana surat nomor KP-01/512/III/SU/2022 Tanggal 31 Maret 2022 tentang Penanganan kredit relaksasi dengan format action plan sesuai SE No. KP-01/02/1/SE/2022 tentang Ketentuan Penanganan Kredit Berisiko tinggi.</li></ol>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			4. Pemantauan pengikatan agunan pada masing-masing kantor, terutama pengikatan agunan lebih dari 6 bulan yang belum selesai.
9.	18 Agustus 2022	6	<p>MATERI PEMBAHASAN : PEMANTAUAN LAR DAN ASSESSMENT RESTRUKTURISASI KREDIT</p> <p>1. Assesmen kredit relaksasi agar dilengkapi dengan data dan fakta sehingga dapat terekam dengan lebih jelas sebagai gambaran secara umum kondisi terkini debitur bersangkutan untuk memudahkan dalam mengambil tindakan selanjutnya. 2. Untuk kinerja bulan Juli di sisi kredit yang diberikan, mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. 3. Dampak PMK sehingga permintaan kredit untuk usaha jual beli hewan kurban menurun cukup signifikan. 4. Kredit dengan kualitas DPK banyak yang jatuh menjadi kredit Non Performing yang disebabkan karena banyaknya orang punya hajat di bulan Juli dan berakibat alokasi dana untuk angsuran beralih untuk kebutuhan sosial.</p>
10.	17 September 2022	6	<p>MATERI RAPAT</p> <p>1. POJK 03/POJK.03/2022 tentang Tingkat Kesehatan Bank. 2. Laporan Kinerja Operasional dan Langkah-langkah kerja Bidang Pemasaran (Komite Kredit) dan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang masing-masing. 3. Masih terdapat penerapan Tatakelola dan Manajemen Risiko perusahaan yang belum optimal. 4. Indikator LAR 28 %, progress NPL 5,55%, Kualitas Restrukturisasi dan Relaksasi rendah. 5. Action plan program percepatan peningkatan kualitas kredit belum optimal. 6. Kualitas SDM hasil Pelatihan Analisa Kredit dan Appraisal. 7. MOu dengan Notaris.</p> <p>KEPUTUSAN RAPAT DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS</p> <p>1. Melakukan evaluasi terhadap penerapan tatakelola dengan baik, satu contoh penerapan sistem rapat komite kredit di Bidang Pemasaran lebih dioptimalkan sehingga outputnya lebih optimal. 2. Mendorong Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko lebih optimal dalam memitigasi risiko, diharapkan dalam mengukur risk appetite serta risk tolerance lebih tepat. 3. Melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terhadap pelaksanaan keputusan kredit, memerintahkan kepada Komite kredit dalam keputusan pemberian kredit wajib dilakukan verifikasi dan klarifikasi data dilapangan untuk dijadikan materi dalam rapat komite kredit, sehingga fakta dan data lebih obyektif untuk memastikan pengajuan kredit tersebut baik dokumen maupun kondisi 5C nya dapat dipertanggungjawabkan. 4. Melakukan evaluasi terhadap action plan program peningkatan percepatan kualitas kredit secara maksimal dengan sistem target. 5. Mereview MOU dengan Notaris/PPAT terkait dengan</p>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			<p>ligitimasi perikatan agunan kredit.</p> <p>6. Segera menindaklanjuti kegiatan operasional dengan penerapan TKS sesuai dengan POJK 03/POJK.03/2022.</p> <p>7. Melakukan review terhadap kualitas SDM khususnya dibidang pemasaran dan atau pegawai baru dalam memberikan kontribusi pada perusahaan, khususnya dibidang Analisa kredit dan Appraisal Agunan.</p>
11.	15 Oktober 2022	6	<p>MATERI PEMBAHASAN :</p> <p>KLARIFIKASI HASIL RAPAT PENGURUS TANGGAL 17 SEPTEMBER 2022 DAN PEMBAHASAN LHP OJK</p> <p>BEBERAPA HAL YANG SUDAH DI TINDAKLANJUTI</p> <p>1. Rapat komite dilaksanakan terutama untuk berkas kredit dengan opini Tinggi dan Sangat Tinggi plafon diatas Rp.300.000.000</p> <p>2. Bidang Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara periodik untuk mengukur tingkat risiko pada masing-masing aspek kegiatan operasional.</p> <p>3. Untuk risiko kredit dilakukan pada setiap berkas kredit yang menjadi kewenangan pemutus kredit Kabid Pemasaran dan Direksi serta berkas kredit tertentu dari Kantor Operasional yang memiliki NPL Diatas 5%.</p> <p>4. Program percepatan peningkatan kualitas kredit diupayakan maksimal guna mengantisipasi peningkatan DPK dan penyelesaian kredit relaksasi.</p> <p>5. Notaris yang overload pekerjaan yaitu Notaris Hendri Widiharsi dan Notaris Noor Saptanti, order dialihkan Notaris Hendrawan.</p> <p>6. Order pada Notaris Tri Mujahidin yang meninggal secara bertahap sudah diselesaikan oleh Notaris lain,</p> <p>7. Analisa kredit sudah menggunakan Aplikasi dari Smart Konsultama dengan output yang lengkap dan informatif.</p> <p>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OJK</p> <p>1. Lemahnya Analisa kredit menjadi perhatian untuk memperbaiki kinerja di bidang pemasaran terutama sub bidang account officer.</p> <p>2. Pengisian Jabatan Kepala Kantor Kas Puhpelem diisi terlebih dahulu mengingat aset yang besar dan kesalahan analisa kredit yang dilakukan di kantor kas segera dilakukan refreshment untuk melaksanakan fungsi kantor kas sebagaimana mestinya.</p> <p>3. Dalam RBB 2023, KPO ada penambahan SDM untuk membuka pasar baru dengan ekspansi kredit umum sebagai pengganti kredit Profesi.</p> <p>4. Untuk meningkatkan penghimpunan dana dengan membuka produk tabungan Tamades Mapan yaitu jenis tabungan berjangka.</p>
12.	26 November 2022	5	<p>MATERI PEMBAHASAN</p> <p>PEMBAHASAN DRAFT PENYUSUNAN RENCANA BISNIS BANK TAHUN 2023 DAN VERIFIKASI PH KREDIT MACET</p> <p>1. Rata-rata pertumbuhan di semua sektor keuangan utama sebesar 6 % sampai dengan 7 % serta Indikator keuangan utama dalam kondisi sehat dan penyusunan RBB tahun 2023 sudah wajar.</p> <p>2. Strategi bisnis mempertimbangkan Analisa SWOT sehingga dalam pelaksanaan operasional dapat memperbaiki kekurangan, memitigasi ancaman serta mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki</p>



			untuk dapat memenangkan persaingan. 3. Perencanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia terutama dari pos kesejahteraan pegawai berorientasi pada peningkatan kinerja sehingga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Verifikasi Administrasi Penghapusbukuan (PH) Kredit Macet.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2022 telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali.			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	AGUS PRASUTIO, SH.M.Si	12	0	100%
2.	ARISTIAN HARI MARJOKO, SE.MM	12	0	100%
3.	EDHY TRI HADYANTHO, S.Sos.M.Si	10	0	83.33333333333334%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 12 kali selama tahun 2022 dengan tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris 100%				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Pemeriksaan Khusus Pegawai tetap yang melakukan Penyimpangan Internal telah selesai dilakukan dan menunggu sanksi yang akan diberikan. Pegawai tersebut diberhentikan sementara mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 28 Februari 2023.								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2022 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03 Januari 2022	Sosial	Bantuan kepada 4 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Pusat Operasional	Anak Yatim	Rp1.200.000,00
2.	06 Januari 2022	Sosial	Bantuan kepada 3 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Jatiroto dan Baturetno	Anak Yatim	Rp900.000,00
3.	26 Januari 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Giriwoyo	Anak Yatim	Rp300.000,00
4.	31 Januari 2022	Sosial	Bantuan Pembangunan Masjid di Kecamatan	Takmir Masjid Kecamatan Tirtomoyo	Rp500.000,00





**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			Tirtomoyo		
5.	17 Februari 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Giritontro	Anak Yatim	Rp300.000,00
6.	23 Februari 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Pusat Operasional	Anak Yatim	Rp300.000,00
7.	02 Maret 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid di Kecamatan Girimarto	Takmir Masjid Kecamatan Girimarto	Rp3.000.000,00
8.	14 Maret 2022	Sosial	Bantuan kepada 2 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Giritontro	Anak Yatim	Rp600.000,00
9.	16 Maret 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid di Kecamatan Jatisrono	Takmir Masjid Kecamatan Jatisrono	Rp1.000.000,00
10.	16 Maret 2022	Sosial	Bantuan kepada 2 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Baturetno	Anak Yatim	Rp600.000,00
11.	22 Maret 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid di Kecamatan Purwantoro	Takmir Masjid Kecamatan Purwantoro	Rp1.000.000,00
12.	29 Maret 2022	Sosial	Bantuan kepada keluarga kurang mampu Program Ibu Anak Pitu Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri	Keluarga kurang mampu	Rp1.405.550,00
13.	05 April 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cab. Giriwoyo	Anak Yatim	Rp300.000,00
14.	06 April 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid di Kecamatan Wonogiri	Takmir Masjid Kecamatan Wonogiri	Rp1.000.000,00
15.	07 April 2022	Sosial	Bantuan sembako keluarga kurang mampu di sekitar semua Kantor Operasional dalam	Keluarga kurang mampu	Rp27.500.000,00



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah  
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			rangka bulan Ramadhan		
16.	13 April 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid Rumah Tahanan Kabupaten Wonogiri	Takmir Masjid Rumah Tahanan	Rp8.400.000,00
17.	21 April 2022	Sosial	Bantuan kepada 4 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses KPO	Anak Yatim	Rp1.200.000,00
18.	09 Mei 2022	Sosial	Pemberian paket sembako bagi keluarga kurang mampu dalam rangka bulan Ramadhan	Keluarga kurang mampu	Rp8.467.292,00
19.	09 Mei 2022	Sosial	Pemberian paket takjil dalam rangka bulan ramadhan di Masjid Rumah Tahanan	Takmir Masjid Rumah Tahanan	Rp8.010.000,00
20.	09 Mei 2022	Sosial	Bantuan bagi penyandang difabel di Kabupaten Wonogiri	Yayasan Difabel Kabupaten Wonogiri	Rp800.000,00
21.	12 Mei 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid Rumah Tahanan Kabupaten Wonogiri	Takmir Masjid Rumah Tahanan	Rp6.000.000,00
22.	30 Mei 2022	Sosial	Bantuan untuk 15 anak Yatim melalui PWRI Kabupaten Wonogiri	Anak Yatim	Rp3.000.000,00
23.	31 Januari 2023	Sosial	Bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni keluarga kurang mampu di Kecamatan Slogohimo	Keluarga kurang mampu	Rp10.000.000,00
24.	31 Mei 2022	Sosial	Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni keluarga kurang mampu di Kecamatan Baturetno	Keluarga kurang mampu	Rp10.000.000,00
25.	06 Juni 2022	Sosial	Pemberian paket sembako untuk masyarakat sekitar Kantor Pusat dalam rangka bulan ramadhan	Keluarga kurang mampu	Rp760.000,00
26.	06 Juni 2022	Sosial	Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi Kabupaten Wonogiri	Mahasiswa Berprestasi	Rp100.000.000,00
27.	06 Juni 2022	Sosial	Pemberian bantuan kepada korban kecelakaan di	Keluarga korban kecelakaan	Rp5.000.000,00



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**  
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			Kecamatan Jatisrono		
28.	28 Juni 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Purwantoro	Anak Yatim	Rp300.000,00
29.	07 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Wonogiri	Panitia Qurban Kabupaten Wonogiri	Rp35.000.000,00
30.	07 Juli 2022	Sosial	Bantuan kepada pondok pesantren Al Mukmin Polres Wonogiri	Anak Yatim	Rp3.300.000,00
31.	23 Agustus 2022	Sosial	Bantuan kepada anak yatim dalam rangka Jambore Anak Yatim Jawa Tengah	Anak Yatim	Rp1.000.000,00
32.	05 September 2022	Sosial	Bantuan pondok pesantren Al Ibanah Desa Purworejo	Anak Yatim	Rp5.000.000,00
33.	09 September 2022	Sosial	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni keluarga kurang mampu di Kecamatan Ngadirojo	Keluarga kurang mampu	Rp10.000.000,00
34.	23 September 2022	Sosial	Pemberian sembako untuk keluarga tidak mampu melalui komunitas Jeep Adventure Club Wonogiri	Keluarga kurang mampu	Rp3.735.000,00
35.	23 September 2022	Sosial	Pemberian sembako keluarga kurang mampu dalam rangka HUT Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Wonogiri	Keluarga kurang mampu	Rp1.754.000,00
36.	23 September 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Tirtomoyo	Anak Yatim	Rp300.000,00
37.	04 Oktober 2022	Sosial	Bantuan kepada 2 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Slogohimo	Anak Yatim	Rp600.000,00
38.	17 Oktober 2022	Sosial	Bantuan untuk Yayasan Giri Wiyata Dharma / SLB Wonogiri	Difabel Kabupaten Wonogiri	Rp1.000.000,00



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

39.	26 Oktober 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Ngadirojo	Anak Yatim	Rp300.000,00
40.	14 November 2022	Sosial	Bantuan kepada 2 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cab. Slogohimo	Anak Yatim	Rp600.000,00
41.	14 November 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid Nur Hidayah Kecamatan Pracimantoro	Takmir Masjid Kecamatan Pracimantoro	Rp1.000.000,00
42.	18 November 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Slogohimo	Anak Yatim	Rp300.000,00
43.	30 November 2022	Sosial	Bantuan korban gempa Kabupaten Cianjur Jawa Barat	Korban Gempa Cianjur	Rp1.000.000,00
44.	30 November 2022	Sosial	Bantuan pembangunan mushola Nurul Hikmah Kecamatan Purwantoro	Takmir Mushola Nurul Hikmah	Rp1.000.000,00
45.	05 Desember 2022	Sosial	Bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni keluarga kurang mampu di Kecamatan Batuwarno	Keluarga kurang mampu	Rp10.000.000,00
46.	05 Desember 2022	Sosial	Bantuan untuk kegiatan pendampingan Desa di Kecamatan Kismantoro	Pendamping Desa Kecamatan Kismantoro	Rp30.000.000,00
47.	06 Desember 2022	Sosial	Bantuan untuk kegiatan peringatan hari Disabilitas Nasional Kabupaten Wonogiri	Difabel Kabupaten Wonogiri	Rp1.000.000,00
48.	09 Desember 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cab. Purwantoro	Anak Yatim	Rp300.000,00
49.	09 Desember 2022	Sosial	Bantuan korban kebakaran di Kabupaten Wonogiri	Korban kebakaran	Rp2.000.000,00
50.	12 Desember 2022	Sosial	Bantuan	Takmir Masjid	Rp1.000.000,00



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah  
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			pembangunan masjid di Kecamatan Tirtomoyo	Kecamatan Tirtomoyo	
51.	20 Desember 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid di Kecamatan Bulukerto	Takmir Masjid Kecamatan Bulukerto	Rp1.000.000,00
52.	26 Desember 2022	Sosial	Bantuan untuk kegiatan UMKM di Kecamatan Kismantoro	UMKM Kecamatan Kismantoro	Rp10.000.000,00
53.	26 Desember 2022	Sosial	Bantuan pembangunan masjid di Kecamatan Puhpelem	Takmir Masjid Kecamatan Puhpelem	Rp1.000.000,00
54.	30 Desember 2022	Sosial	Bantuan kepada 1 anak yatim dalam bentuk Tabungan Simpel Ayah Sukses Kantor Cabang Baturetno	Anak Yatim	Rp300.000,00
55.	31 Desember 2022	Sosial	Bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni keluarga kurang mampu di Kecamatan Wonogiri	Keluarga kurang mampu	Rp7.500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial diberikan untuk kegiatan Sosial, Pendidikan, Keagamaan dan UMKM.					



### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat	: JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp61.862.017.334,00
Total Aset	: Rp591.285.137.763,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.43	0.286
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.57	0.236
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.81	0.181
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.05	0.205
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.90	0.048
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.91	0.191
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.10	0.158
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.30	0.173
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.800</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>



## KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2022 BOBOT BPR C

### HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.43	0.286	<p>Jumlah anggota Direksi ada 3 (tiga) orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Utama.</li><li>2. Direktur Umum dan Kepatuhan;.</li><li>3. Direktur Pemasaran.</li></ol> <p>Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. dan diangkat melalui RUPS.</li><li>2. Bertempat tinggal di Kabupaten yang sama.</li><li>3. Tidak merangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank/ Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas).</li><li>4. Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham.</li></ol> <p>Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam RUPS. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi, baik dari auditor intern maupun ekstern. Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu untuk Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku serta membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan. Direksi cukup optimal dalam peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis.</p>
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.57	0.236	<p>Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisaris Utama</li><li>2. Komisaris Independen</li></ol> <p>Komisaris Edhy Tri Hadyantho, S.Sos.M.Si telah habis masa Jabatan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan untuk pengisian Jabatan Komisaris masih menunggu hasil Uji Kelayakan dan Uji Kepatuhan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			<p>Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS.</li><li>2. Bertempat tinggal di Provinsi yang sama.</li><li>3. Tidak merangkap jabatan di Bank Perusahaan Non Bank/ Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas).</li><li>4. Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham,</li></ol> <p>Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada. Secara umum Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan strategis serta memberikan rekomendasi kepada Direksi yang tertuang dalam Buku Kerja Komisaris dan Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan Direksi minimal satu bulan sekali. Berdasarkan risalah pemeriksaan OJK tahun 2022, Dewan Komisaris memastikan pengurus menindaklanjuti hasil pemeriksaan KAP dan Audit Intern. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat perbedaan pendapat, semua perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dewan Komisaris selain mendapatkan remunerasi juga mendapatkan fasilitas yang ditetapkan RUPS sesuai peraturan yang ada.</p>
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite <b>Bobot 0, S+P+H = 0</b>	<b>0</b>	Tahun 2022 Perusahaan belum membentuk komite- komite kerja. Hal ini dikarenakan modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
B0400	Penanganan benturan kepentingan <b>Bobot 0.1, S+P+H = 2</b>	<b>0.2</b>	Perusahaan telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat Pengurus dan Pegawai. Pada tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR <b>Bobot 0.1, S+P+H = 1.81</b>	<b>0.181</b>	Perusahaan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 yang bekerja secara independen dan telah menyusun pedoman kerja sistem prosedur kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berusaha memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan, dan secara bertahap sosialisasi ketentuan dilaksanakan kepada seluruh pegawai, sekaligus memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem prosedur serta kegiatan yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan. Sehingga tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain.
B0600	Penerapan fungsi audit	<b>0.205</b>	Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Auditor Intern (SKAI)





**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.05		yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Ketua SKAI dinyatakan kompeten serta telah memiliki Sertifikasi Auditor. SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern dan sudah menerapkan aspek dan unsur kegiatan Audit Intern. Pada tahun 2019 telah dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan hasil pemeriksaan rutin berupa audit intern sudah dilaporkan OJK setiap selesai pemeriksaan. Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.9	<b>0.048</b>	Berdasarkan RUPS-LB Perusahaan menugaskan KAP DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan ditahun 2022 dengan cakupan hasil audit sebagaimana diatur OJK. Laporan Hasil Audit dan Manajemen Leter akan dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir April 2023.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.91	<b>0.191</b>	Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 serta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Perusahaan telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit. Dalam upaya pengendalian intern, Perusahaan secara menyeluruh telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan melakukan perbaikan SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. Perusahaan telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Perusahaan menyusun laporan profil risiko dan laporan produk baru ditahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.1	<b>0.158</b>	Perusahaan telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur BMPK, namun belum disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK yang terbaru. Penyesuaian kebijakan internal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan dilakukan paling lambat akhir bulan Februari 2023. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah mengacu pada POJK tentang BMPK dan peraturan internal Perusahaan. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait telah dikirimkan laporan kepada OJK dan selama tahun 2022 tidak ada pelanggaran BMPK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.84	<b>0.138</b>	RBB tahun 2023 telah disusun yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, rencana tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan Perusahaan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK. RBB telah disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi serta telah didukung pemegang saham dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor, persetujuan pengembangan infrastruktur berupa inventaris kantor dan perbaikan gedung, pengembangan Teknologi Informasi dan kelengkapan sarana prasarana lainnya. Dewan Komisaris selalu memantau terhadap pelaksanaan RBB yang dilakukan dalam rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non	<b>0.173</b>	Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali dan untuk Laporan Keuangan



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.3		Tahunan akan dilaporkan kepada OJK maksimal pada akhir bulan April 2023 serta akan dimuat dalam Surat Kabar. Laporan keuangan publikasi tersebut secara garis besar disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan di tahun 2022 tidak ada pengaduan nasabah.
<b>Nilai Komposit</b>	<b>1.8</b>	
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>2</b>	
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>	



## B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi 3 (tiga) orang yaitu : 1. Direktur Utama. 2. Direktur Umum dan Kepatuhan. 3. Direktur Pemasaran.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Wonogiri. 1. Sarti, SE.MM, sebagai Direktur Utama tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 2. Yani Harmini, SP, sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 3. Suwanto, SE sebagai Direktur Pemasaran tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan).
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test),</p> <p>1. Sarti, SE.MM, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-33/KO.0301/2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Sarti Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 April 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/806/ V/ SU/2021 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-806/ KO.0301/2021. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan 27 April 2026.</p> <p>2. Yani Harmini, SP, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-3/KO.0301/2022 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Yani Harmini Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Umum dan Kepatuhan) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS- LB tanggal 27 Januari 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP 01/147/ I/ SU/2022 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-461/ KO.0301/2022. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2027.</p> <p>3. Suwanto, SE, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor 20/ KO.42/2014 Tanggal 17 Juni 2014 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan selaku calon Direktur Pemasaran PD BPR BKK Wonogiri. Kemudian diangkat sebagai Direktur Pemasaran PD BPR BKK Wonogiri dan diperpanjang melalui RUPS- LB Tanggal 6 Agustus 2018. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS- LB tanggal 21 Mei 2019 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/1581/ XI/ SU/2019 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S 1025/ KO.0301/2019. Dengan masa jabatan</p>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 06 Agustus 2023.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	<b>1</b>	Direksi melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab secara Independen dan tidak memberikan Kuasa Umum, serta tidak ada satupun Surat Kuasa Umum yang diterbitkan.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	<b>2</b>	Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	<b>2</b>	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	<b>2</b>	Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis, selalu dilakukan Direksi berdasarkan musyawarah dan mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	<b>1</b>	Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan:  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			3. Pemberian Remunasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS-LB.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamide maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Disamping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif maupun Struktural setiap sebulan sekali, untuk sharing informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan, diantaranya perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian Risiko Kredit.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Etika Kerja dan Peraturan Rapat yaitu Peraturan Direksi Nomor 04/ VI/ Per.Dir/2022 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
	<b>Total</b>	<b>15</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.88</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.75</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Setiap Kebijakan Strategis di Bidang Kepegawaian selalu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam :  1. Peraturan Direksi Nomor 06/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Sistem Rekrutmen, Pengangkatan, Kepangkatan dan



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			<p>Pemberhentian Pegawai.</p> <p>2. Peraturan Direksi Nomor 07/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Sistem Pengadaan Dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Dan Alih Daya.</p> <p>3. Peraturan Direksi Nomor 08/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Disiplin Pegawai.</p> <p>4. Peraturan Direksi Nomor 09/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Mutasi, Alih Status, Promosi Dan Demosi Pegawai.</p> <p>5. Peraturan Direksi Nomor 10/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Cuti Pegawai.</p> <p>6. Peraturan Direksi Nomor 11/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Remunerasi Pegawai.</p> <p>7. Peraturan Direksi Nomor 12/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Perkawinan Dan Perceraian Pegawai.</p> <p>8. Peraturan Direksi Nomor 13/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penilaian Kinerja Individu (Key Performance Indicators).</p>
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion sejauh ini tidak ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai belum optimal tercermin dari, terdapat LAR (Loan at Risk) yang masih tinggi, meskipun NPL (Non Perform Loan) dibawah 5 % sudah tercapai. Kemampuan analisis kredit belum optimal.</p> <p>Namun demikian terdapat pertumbuhan kredit sebesar 6,79%, pertumbuhan dana sebesar 7,34%, pertumbuhan aset sebesar 4,53% dan pertumbuhan laba sebesar 23,81% dari tahun 2021.</p>
H0105	Direksi menyampaikan laporan	1	Laporan Penerapan Tata Kelola yang



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan Kantor Media atau Majalah sudah dilaksanakan sejak periode laporan tahun 2017.
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.8</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.18</b>	





## B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	4	<p>Jumlah Anggota Dewan Komisaris posisi laporan Desember 2022 belum sesuai dengan ketentuan yaitu 2 (dua) orang :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisaris Utama.</li><li>2. Komisaris Independen.</li></ol> <p>Masa jabatan Komisaris berakhir pada tanggal 18 Oktober 2022 selanjutnya berdasarkan RUPS-LB tanggal 08 September 2022 disetujui untuk dilakukan seleksi pengisian Jabatan Komisaris.</p> <p>Berdasarkan RUPS-LB tanggal 29 November 2022 sudah dilakukan penetapan Calon Komisaris dan telah diajukan permohonan untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya akan segera disampaikan laporan pengangkatan Komisaris setelah adanya pengumuman hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan pada kesempatan pertama.</p>
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	<p>Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang tidak melampaui jumlah Direksi sesuai ketentuan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisaris Utama Saudara Agus Prasutio, SH.M.Si.</li><li>2. Komisaris Independen Saudara Aristian Hari Marjoko, SE.MM.</li></ol>
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	<p>Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saudara Agus Prasutio, SH.M.Si, lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) OJK berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor Kep 30/ KO.032/2016 Tanggal 27 Juni 2016. Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPS-LB Tanggal 21 Mei 2019, dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/691/ VI/ SU/2019 Tanggal 19 Juli 2019 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-699/</li></ol>



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			<p>KO.0301/2019 Tanggal 09 Agustus 2019. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.</p> <p>2. Saudara Aristian Hari Marjoko, SE.MM telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) OJK berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KRP-24/ KO.0301/2020 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan tanggal 17 April 2020. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPS-LB tanggal 30 April 2020 dan telah dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/535/ V/ SU/2020 tanggal 05 Mei 2020 serta telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-462/ KO.0301/2020 tanggal 03 Juni 2020. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2024.</p>
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	<p>Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili dalam Provinsi yang sama :</p> <p>1. Agus Prasutio, SH.M.Si Sebagai Komisaris Utama berdomisili di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Aristian Hari Marjoko, SE.MM Sebagai Komisaris Independen berdomisili di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.</p>
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	<p>Sesuai ketentuan, Perusahaan telah memiliki Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan :</p> <p>1. Salinan Keputusan OJK Nomor KRP 24/ KO.0301/2020 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan tanggal 17 April 2020.</p> <p>2. RUPS- LB tanggal 30 April 2020 dan telah dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/535/ V/ SU/2020 tanggal 05 Mei 2020 ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-462/ KO.0301/2020 tanggal 03 Juni 2020. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2024.</p>
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	dan rapat.		tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom-WNG /2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris juga tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/ atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
	<b>Total</b>	<b>13</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.44</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.72</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan, termasuk prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam buku kerja maupun notulen rapat.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang dituangkan dalam catatan/ notulen maupun disampaikan secara lisan.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan	1	Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional. Hanya dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, Dewan Komisaris terlibat dalam persetujuannya sebagaimana diatur dalam



## PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Di tahun 2022 tidak ada Dissenting Opinion, apabila terjadi perbedaan pendapat, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Secara umum Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan Pendapatan remunerasi dan fasilitas Dewan Komisaris sesuai dengan :  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.  3. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS-LB.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung	2	Pemantauan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		sederhana tertulis dalam buku hadir/kunjungan. Namun secara keseluruhan pemantauan dilakukan terhadap kinerja semua anggota Direksi.
	<b>Total</b>	<b>13</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.63</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.65</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	<b>2</b>	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam Risalah Hasil Rapat Pengurus, yang ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, arsip notulen rapat tersimpan di kantor Perusahaan dan di tahun 2022 tidak ada Dissenting Opinions.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.1	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	



## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Perusahaan telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 39/V/ Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Di tahun 2022 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

---

Nilai Struktur	0.2	
----------------	-----	--





## B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen.	1	Perusahaan sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/ Per.Dir/2020 tentang Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi Nomor 33/ V/ Per.Dir/2020 tentang Penjabaran Kedudukan, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Tata Kerja Pegawai.
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.4</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.7</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berusaha untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan



# PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		peraturan perundang-undangan yang lain termasuk penyampaian laporannya, namun demikian didalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan laporan yang menimbulkan denda.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Secara bertahap anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, baik secara langsung menyampaikan ke kantor operasional maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan mandiri di kantor pusat perusahaan serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ sosialisasi/ workshop/ seminar (melalui daring) yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperbaiki setiap koreksi/ evaluasi yang dilakukan OJK serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil sehingga sejauh ini tidak ada kebijakan/ keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang lain.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, selalu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan yang sudah ada serta menyusun dan merekomendasikan kebijakan baru kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
	<b>Total</b>	<b>11</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.88</b>	



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	<b>4</b>	Perusahaan belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. Hasil temuan OJK pada tahun 2022 sebanyak 13 temuan dan ditahun 2021 sebanyak 8 temuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	<b>1</b>	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala setiap 1 tahun sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris. Laporan Periode tahun 2022 akan dilaporkan maksimal pada tanggal 30 April 2023.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	Ditahun 2022 tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang- undangan yang lain, sehingga tidak ada laporan khusus anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.23</b>	



## B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0601	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	1	Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 35/ V/Kep.Dir/2013 Tanggal 3 Mei 2013.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Penempatan pegawai sebagai auditor diangkat dari pegawai yang sudah senior dan dikembangkan dengan mengikuti sertifikasi, pendidikan dan pelatihan yang mendukung kompetensi sebagai auditor.
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.8</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.9</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan audit tahunan</li><li>2. Penunjukan tenaga audit</li><li>3. Rencana audit</li><li>4. Strategi audit</li><li>5. Pelaksanaan audit</li><li>6. Konfirmasi hasil audit</li><li>7. Pembahasan hasil audit</li><li>8. Monitoring dll.</li></ol>
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2019 dan telah dilaporkan kepada OJK tanggal 26 Februari 2020.
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persiapan Audit.</li><li>2. Penyusunan Program Audit.</li><li>3. Pelaksanaan Audit.</li><li>4. Pelaporan Hasil Audit.</li></ol> Namun tindak lanjut pasca audit belum dipantau secara intensif.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten.  Namun Anggota SKAI belum memiliki Sertifikasi.
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah	2	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan



## PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemeriksaan rutin berupa pokok-pokok hasil audit intern (laporan eksekutif) sudah dilaporkan kepada OJK setiap selesai pemeriksaan. Setiap akhir tahun SKAI juga telah menyampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Laporan hasil kaji ulang dari pihak ekstern yaitu KAP INDARTO WALUYO periode laporan tahun 2019 telah dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 26 Februari 2020.
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pengangkatan Ketua SKAI yaitu saudara Satino, SE berdasarkan SK Direksi Nomor 56/VI/ Kep.Dir/2022 tanggal 14 Juni 2022 telah dilaporkan ke OJK tanggal 15 Juni 2022 dengan surat nomor KP-01/1032/VI/ SU/2022 dan telah diadministrasikan oleh OJK dengan surat Nomor S-180/ KO.03012/2022 tanggal 26 Juli 2022.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.15</b>	



## B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan Audit kepada kantor KAP "DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO" untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2022, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 043/KAP DB/SPK/X/2022 dan KP-01/158/ X/ PKS/2022, dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017.  Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	KAP DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO berdasar persetujuan RUPS tanggal 06 Oktober 2022 ditunjuk sebagai General Audit Tutup Buku Tahun Anggaran 2022.  KAP DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :  1. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182.  2. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik : STTD.AP00004/PB.122/2017.  3. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik : STTD.KAP00020/PM.22/2017.
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada	4	Audit KAP masih dalam proses pemeriksaan, sehingga Hasil Audit KAP dan Management



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		Letter belum dilaporkan, dan akan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada akhir bulan April 2023.
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	<b>4</b>	Permasalahan yang dihadapi Perusahaan belum terlihat dikarenakan Audit KAP masih dalam proses pemeriksaan.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	<b>4</b>	Perusahaan belum bisa melihat cakupan hasil audit dikarenakan Audit KAP masih dalam proses pemeriksaan.
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>4</b>	





**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

---

<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	



## B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0801	BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	1	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional Perusahaan.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/32/ VIII/ SE/2020 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.67</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.84</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.  Untuk mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi di antaranya diatur dalam :  1. Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/022/ XI/ SE/2019 Tentang Standar Penilaian Tingkat Risiko Permohonan Kredit.  2. Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/1/ I/



# PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			<p>SE/2020 Tentang Checklist Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko.</p> <p>3. Surat Edaran Direksi Nomor-KP 01/027/XII/ SE/2022 Tentang Penetapan Limit Risiko dan Langkah Mitigasi Menurunkan NPL Kredit Mentari diatur dalam</p> <p>4. Surat Direksi Nomor KP-235/ II/ SU/2022 Perihal Tindak Lanjut Atas Saran/ Mitigasi Risiko Yang Diberikan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p>
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	<p>1. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>2. Dewan Komisaris sudah melakukan evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko namun dalam pelaksanaannya belum optimal.</p> <p>3. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Perusahaan telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Perusahaan telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian terutama untuk risiko kredit, namun masih



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah**

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			diperlukan perhatian lebih dalam penanganan LAR (Loan At Risk).
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/407/VII/PKS/2017 dan Nomor 047/PKS/USSI/VII/2017.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.
	<b>Total</b>	<b>16</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.29</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.92</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Perusahaan telah menyusun dan akan melaporkan Laporan Profil Risiko Semester II kepada OJK paling lambat tanggal 31 Januari 2023
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Perusahaan selalu menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK. Untuk tahun 2022 ada produk baru Tabungan Mapan dan telah dilaporkan pada OJK dengan surat Nomor KP-01/2066/XI/SU/2022 tanggal 18 November 2022.
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.15</b>	



## B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 38/ V/ Per.Dir/2020 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK akan disusun disesuaikan dengan POJK terbaru Nomor 23 Tahun 2022 paling lambat pada bulan Februari 2023.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses Pemberian Kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 93/ XI/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 71/ VIII/ Per.Dir/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI (Peseroda) Nomor 93/ XI/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) sebagai perubahan Pertama dan Peraturan Direksi Nomor 84/ XI/ Per.Dir/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI (Peseroda) Nomor 93/ XI/ Per.Dir/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda).
	<b>Total</b>	<b>5</b>	



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

	<b>Rata-rata</b>	<b>2.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	Laporan telah dibuat dan dikirimkan secara berkala secara benar dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	Perusahaan tidak pernah melanggar BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	



## B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB Tahun 2023 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Perusahaan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Pemegang saham mendukung sepenuhnya RBB yang dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor, persetujuan pengembangan infrastruktur berupa inventaris kantor dan pengadaan maupun perbaikan gedung kantor, pengembangan Teknologi Informasi dan kelengkapan sarana prasarannya serta dukungan berupa persetujuan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Direksi.
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.67</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.84</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan :  1. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.  2. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.  3. Penerapan Manajemen Risiko.  Faktor- faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

			terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis dan Perubahan Rencana Bisnis disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	





## B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menangani pelaporan sehingga ke depan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali. Untuk laporan keuangan publikasi triwulan IV akan dilaporkan ke OJK sesuai dengan ketentuan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Perusahaan telah menyusun laporan tahunan dengan materi yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari Akuntan Publik atas laporan keuangan tahunan, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Transparansi informasi produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Informasi produk dilakukan dengan melalui berbagai media di antaranya berupa leaflet, spanduk, promosi media massa, dll.
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Keuangan Publikasi secara garis besar telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.



	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.75</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.7</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur Utama, sedangkan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Direksi serta disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	<b>1</b>	Untuk tahun 2022 tidak ada kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk Perusahaan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.43)

Jumlah anggota Direksi ada 3 (tiga) orang yaitu :

1. Direktur Utama.
2. Direktur Umum dan Kepatuhan;
3. Direktur Pemasaran.

Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan :

1. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. dan diangkat melalui RUPS.
2. Bertempat tinggal di Kabupaten yang sama.
3. Tidak merangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank/Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas).
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, dengan Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam RUPS. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi, baik dari auditor intern maupun ekstern. Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu untuk Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis, selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Direksi cukup kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku serta membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan. Direksi cukup optimal dalam peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.57)

Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang yaitu :

1. Komisaris Utama
2. Komisaris Independen

Komisaris Edhy Tri Hadyantho, S.Sos.M.Si telah habis masa Jabatan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan untuk pengisian Jabatan Komisaris masih menunggu hasil Uji Kelayakan dan Uji Kepatuhan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan :

1. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS.
2. Bertempat tinggal di Provinsi yang sama.
3. Tidak merangkap jabatan di Bank Perusahaan Non Bank/Lembaga lain (Partai Politik atau Ormas).
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, dengan Anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham,

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada. Secara umum Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan strategis serta memberikan rekomendasi kepada Direksi yang tertuang dalam Buku Kerja Komisaris dan Notulen



Rapat yang diselenggarakan bersama dengan Direksi minimal satu bulan sekali. Berdasarkan risalah pemeriksaan OJK tahun 2022, Dewan Komisaris memastikan pengurus menindaklanjuti hasil pemeriksaan KAP dan Audit Intern. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat perbedaan pendapat, semua perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dewan Komisaris selain mendapatkan remunerasi juga mendapatkan fasilitas yang ditetapkan RUPS sesuai peraturan yang ada.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Tahun 2022 Perusahaan belum membentuk komite-komite kerja. Hal ini dikarenakan modal inti yang dimiliki belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)**

Perusahaan telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat Pengurus dan Pegawai. Pada tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.81)**

Perusahaan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 yang bekerja secara independen dan telah menyusun pedoman kerja sistem prosedur kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berusaha memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan, dan secara bertahap sosialisasi ketentuan dilaksanakan kepada seluruh pegawai, sekaligus memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem prosedur serta kegiatan yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan, selanjutnya selalu melakukan update kebijakan dengan melakukan pengkinian kebijakan. Sehingga tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.05)**

Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Auditor Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Ketua SKAI dinyatakan kompeten serta telah memiliki Sertifikasi Auditor. SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern dan sudah menerapkan aspek dan unsur kegiatan Audit Intern. Pada tahun 2019 telah dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan hasil pemeriksaan rutin berupa audit intern sudah dilaporkan OJK setiap selesai pemeriksaan. Dan setiap akhir tahun telah disampaikan ringkasan hasil pemeriksaan kepada OJK.

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.9)**

Berdasarkan RUPS-LB Perusahaan menugaskan KAP DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan ditahun 2022 dengan cakupan hasil audit sebagaimana diatur OJK. Laporan Hasil Audit dan Manajemen Leter akan dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir April 2023.

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.91)**

Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2019 serta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. Perusahaan telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit. Dalam upaya pengendalian intern, Perusahaan secara menyeluruh telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan melakukan perbaikan SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. Perusahaan telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Perusahaan menyusun laporan profil risiko dan laporan produk baru ditahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK.



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah  
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747  
Website: <http://www.bprbkk.com>. Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

#### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.1)

Perusahaan telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur BMPK, namun belum disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK yang terbaru. Penyesuaian kebijakan internal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan dilakukan paling lambat akhir bulan Februari 2023. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah mengacu pada POJK tentang BMPK dan peraturan internal Perusahaan. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait telah dikirimkan laporan kepada OJK dan selama tahun 2022 tidak ada pelanggaran BMPK.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

RBB tahun 2023 telah disusun yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, rencana tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan Perusahaan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK. RBB telah disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi serta telah didukung pemegang saham dibuktikan dengan pemenuhan modal disetor, persetujuan pengembangan infrastruktur berupa inventaris kantor dan perbaikan gedung, pengembangan Teknologi Informasi dan kelengkapan sarana prasarana lainnya. Dewan Komisaris selalu memantau terhadap pelaksanaan RBB yang dilakukan dalam rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.3)

Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan sekali dan untuk Laporan Keuangan Tahunan akan dilaporkan kepada OJK maksimal pada akhir bulan April 2023 serta akan dimuat dalam Surat Kabar. Laporan keuangan publikasi tersebut secara garis besar disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan di tahun 2022 tidak ada pengaduan nasabah.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Perusahaan secara garis besar telah melaksanakan Tata Kelola BPR dengan baik dengan nilai komposit 1,8. Dalam melaksanakan Tata Kelola tersebut telah mengacu pada prinsip "TARIF" (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness), yang pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) Perusahaan selama satu tahun melalui pendekatan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan pelanggaran/ penyimpangan terhadap seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern dan berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan auditor serta rekomendasi baik dari auditor internal maupun eksternal.

Wonogiri, 20 Januari 2023

**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

Menyetujui

  
  
**AGUS PRASUTIO, SH, M.SI**  
Komisaris Utama

  
  
**SARTI, SE, MM**  
Direktur Utama



**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah  
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747  
Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: [bpr\\_wonogiri\\_kota@yahoo.co.id](mailto:bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id)

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016
- 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/ SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Wonogiri, 20 Januari 2023

**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

  
  
**AGUS PRASUTIO, SH, M.Si**  
Komisaris Utama

Menyetujui

  
  
**SARTI SE MM**  
Direktur Utama